

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perlu penulis tambahkan bahwa Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan kinerja anggota Dewan Perempuan di Kota Yogyakarta. Peneliti telah melakukan observasi dengan melakukan pengisian kuesioner sekaligus wawancara tertulis terkait kinerja dewan kepada 47 orang responden baik itu aktor perpolitikan, jajaran pemerintah, dan masyarakat yang berdomisili di Kota Yogyakarta.

A. Analisis

1. Analisis Efektivitas Kinerja Dewan Perempuan

Efektivitas berhubungan dengan waktu kerja, dalam hal ini penelitian ditujukan guna mengetahui sejauh mana waktu kerja anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta tahun 2014-2018, penulis sampaikan tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.1
Pendapat Responden Terkait Efektivitas Kinerja Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

No	Tingkatan Responden	Jumlah Responden	Presentase
1	Sangat Setuju	3	6 %
2	Setuju	11	23 %
3	Biasa Saja	20	43 %
4	Kurang Setuju	10	21 %
5	Tidak Setuju	3	6 %
Jumlah		47	100%

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa presentase terbanyak yaitu 43% di mana responden menganggap bahwa kinerja anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan

perempuan, artinya efektivitas waktu dalam bekerja sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa kinerja dewan perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Sebanyak 21% responden turut menyatakan kurang setuju, bahkan sebanyak 6% responden menyatakan tidak setuju bahwa kinerja dewan perempuan lebih cepat di bandingkan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyakatkan setuju sebanyak 23 % bahkan 6% sangat setuju bahwa kinerja dewan perempuan memang lebih cepat dibandingkan dewan laki-laki.

Berdasarkan wawancara tertulis dengan responden mereka turut memberikan komentar terkait pengisian kuesioner tersebut. Responden yang mengatakan sangat setuju dan setuju mayoritas melihat kinerja dewan dari beberapa hal sebagaimana pendapat beberapa responden berikut:

“perempuan relatif tidak suka menunda-nunda pekerjaan sehingga terkadang lebih cepat dari pada laki-laki”

“perempuan cenderung akan lebih sigap saat terjadi hal-hal urgent tanpa menunda-nunda waktu”

“Sering diadakannya rapat dewan mayoritas anggota dewan perempuan lebih menghargai waktu dengan datang tepat pada waktunya”

“perempuan lebih disiplin terlebih dalam menghargai waktu saat bekerja”

“sebagai salah satu dewan yang harus senantiasa memikirkan rakyat menjadikan waktu pekerjaan adalah hal yang utama bagi perempuan”

“perempuan cenderung lebih rajin dalam bekerja sehingga berpengaruh pada kecepatan waktu kerja”

“walaupun sebagai perempuan elektabilitas kinerja terlebih waktu tidak kalah dengan dewan laki-laki saat bekerja”

“sejauh ini dewan perempuan lebih menghargai waktu baik itu pada hal-hal kecil”

Adapun responden yang menyatakan biasa saja menganggap kinerja dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“kecepatan kerja tidak dapat diukur berdasarkan jenis kelamin antara perempuan dengan laki-laki memiliki kemampuan yang sifanya relatif”

“sejauh ini perlu ditingkatkan lagi terkait komitmen dewan sehingga tugas dewan dapat berjalan tepat waktu”

“normatif yang terpenting adalah dewan dapat menjalankan tugasnya sebagai waktu rakyat”

“baik laki-laki maupun perempuan memiliki porsi yang sama dalam bekerja tidak ada yang cepat maupun lambat”

“sejauh ini kinerja dewan perempuan belum menampakkan elektabilitas dibanding laki-laki”

“dewan perempuan tidak jauh lebih proaktif dibandingkan laki-laki saat bekerja”

“setiap anggota dewan memiliki jam kerja yang sama untuk kinerja yang tentunya berbeda”

“perempuan tidak seperti laki-laki yang sewaktu-waktu dapat hadir apabila dibutuhkan masyarakat karena keterbatasannya”

Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju bahkan tidak setuju menganggap kinerja dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“Perempuan memiliki keterbatasan dalam hal waktu karena tugas mereka sebagai ibu rumah tangga yang tidak sewaktu-waktu dapat menangani masyarakat pada jam jam tertentu”

“tidak mengetahui sejauh mana kinerja dewan yang sejatinya”

“belum ada anggota dewan perempuan yang lebih unggul dari pada laki-laki saat ini dalam bekerja”

Berdasarkan uraian pendapat responden di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja dewan dalam hal efektivitas waktu sejauh ini biasa saja, hal tersebut dikarenakan kecepatan kerja tidak diukur berdasarkan jenis kelamin mereka, rata-rata kinerja dewan sama saja satu dengan yang lain hanya saja yang lebih unggul perempuan cenderung menghargai waktu dan lebih tepat waktu pada segala hal saat bekerja. Akan tetapi jam kerja kantor yang dimiliki dewan mungkin akan sedikit terbatas bagi peran perempuan yang tidak sewaktu-waktu dapat menghadirinya sebagai contoh saat dipanggil masyarakat tengah malam dan pada jam-jam tertentu.

2. Analisis Efisiensi Kinerja Dewan Perempuan

Efisiensi berhubungan dengan biaya pemakaian program kerja, dalam hal ini penelitian ditujukan guna mengetahui sejauh mana biaya kerja anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta tahun 2014-2018, penulis sampaikan tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.2
Pendapat Responden Terkait Efisiensi Kinerja Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

No	Tingkatan Responden	Jumlah Responden	Presentase
1	Sangat Setuju	3	6 %
2	Setuju	8	17 %
3	Biasa Saja	20	43 %
4	Kurang Setuju	14	30 %
5	Tidak Setuju	2	4 %
Jumlah		47	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa presentase terbanyak yaitu 43% di mana responden menganggap bahwa biaya kinerja anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya efisiensi biaya dalam bekerja sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa biaya dalam kinerja dewan perempuan lebih tinggi ataupun rendah dibandingkan laki-laki. Sebanyak 30% responden turut menyatakan kurang setuju, bahkan sebanyak 4% responden menyatakan tidak setuju bahwa kinerja dewan perempuan lebih efisien dibandingkan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan setuju sebanyak 17% bahkan 6% sangat setuju bahwa kinerja dewan perempuan memang lebih efisien dibandingkan dewan laki-laki.

Berdasarkan wawancara tertulis dengan responden mereka turut memberikan komentar terkait pengisian kuesioner tersebut. Responden yang mengatakan sangat setuju dan setuju mayoritas melihat kinerja dewan dari beberapa hal sebagaimana pendapat beberapa responden berikut:

“perempuan relatif bersifat hemat dan teliti dalam menganggarkan program kerja”

“perempuan terlatih untuk manajemen keuangan baik itu dilingkup terkecil yaitu keluarga”

“perempuan cenderung memikirkan anggaran seminimal mungkin untuk kemudian dimaksimalkan”

“perempuan lebih disiplin terlebih dalam menghargai uang saat bekerja”

“sebagai salah satu dewan yang harus senantiasa memikirkan rakyat menjadikan uang adalah milik rakyat untuk rakyat”

Adapun responden yang menyatakan biasa saja menganggap kinerja dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“efisiensi anggaran kerja tidak dapat diukur berdasarkan jenis kelamin antara perempuan dengan laki-laki memiliki porsi yang sama”

“sejauh ini perlu ditingkatkan lagi terkait komitmen dewan sehingga tugas dewan dapat berjalan tepat sasaran”

“sebagaimana anggaran program kerja sudah diatur dan ditetapkan pada sekretariat dewan”

“baik dewan laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam pemanfaatan anggaran”

“normatif yang terpenting adalah dewan dapat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat”

“sejauh ini anggaran program kerja dewan laki-laki dengan perempuan tidak dibedakan pemanfaatannya”

“baik laki-laki maupun perempuan memiliki porsi yang sama dalam bekerja tidak ada yang lebih banyak maupun lebih sedikit”

Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju bahkan tidak setuju menganggap kinerja dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“Efisiensi anggaran baik dewan laki-laki dengan perempuan sama saja pada garis dan peraturan yang sudah ditetapkan”

“Dewan tidak bekerja secara perseorangan akan tetapi cenderung pada komisi-komisi di mana setiap komisi memiliki program kerja yang tidak hanya melibatkan perempuan secara perseorangan”

Berdasarkan uraian pendapat responden di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja dewan dalam hal efisiensi anggaran sejauh ini biasa saja, hal tersebut dikarenakan pemakaian anggaran kerja tidak diukur berdasarkan jenis kelamin mereka, rata-rata anggaran kerja Dewan memiliki porsi yang sama di mana jumlah tersebut telah ditentukan oleh sekretariat dewan. Penganggaran yang dilakukan dewan akan didasarkan juga dengan kebutuhan publik sebagai contoh kebutuhan dinas-dinas terkait yang diusulkan. Sejalan ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pemanfaatan anggaran.

3. Analisis Legitimasi Kinerja Dewan Perempuan

Legitimasi berhubungan dengan pengakuan, dalam hal ini penelitian ditujukan guna mengetahui sejauh mana pengakuan kerja anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta tahun 2014-2018, penulis sampaikan tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.3
Pendapat Responden Terkait Legitimasi Kinerja Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

No	Tingkatan Responden	Jumlah Responden	Presentase
1	Sangat Setuju	5	11 %
2	Setuju	17	36 %
3	Biasa Saja	19	40 %
4	Kurang Setuju	6	13 %
5	Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah		47	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa presentase terbanyak yaitu 40% di mana responden menganggap bahwa legitimasi anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun

dewan perempuan, artinya pengakuan kerja sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih diakui dibandingkan laki-laki. Sebanyak 36% responden turut menyatakan setuju, bahkan sebanyak 11% responden menyatakan sangat setuju bahwa dewan perempuan diakui masyarakat tidak terkecuali dewan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan kurang setuju sebanyak 13% yang menganggap dewan perempuan adalah sebuah keberuntungan wakil rakyat yang terpilih.

Berdasarkan wawancara tertulis dengan responden mereka turut memberikan komentar terkait pengisian kuesioner tersebut. Responden yang mengatakan sangat setuju dan setuju mayoritas melihat kinerja dewan dari beberapa hal sebagaimana pendapat beberapa responden berikut:

- “perempuan diakui berdasarkan hukum dengan adanya kuota 30%”
- “perempuan saat ini tidak kalah saing dengan laki-laki dalam bekerja”
- “Perempuan yang sukses didunia perpolitikan sangat banyak di Indonesia”
- “perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki”
- “perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki”
- “pemenuhan kuota 30% bagi dewan perempuan”
- “kesetaraan gender di Indonesia tentu membuka peluang bagi perempuan untuk berkompetisi diranah politik”
- “perempuan turut memberikan pemikiran dari sudut pandang yang lain saat bekerja”

Adapun responden yang menyatakan biasa saja menganggap kinerja dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

- “tidak selalu didasarkan pada pemenuhan kuota 30% akan tetapi rakyat yang memilih dan menentukan”
- “perlu ditingkatkan kinerjanya sebagai dewan perempuan”
- “bukan hanya sebatas pemenuhan kuota 30%, kuota tersebut adalah apresiasi bagi perempuan yang ingin terjun keranah politik”
- “semua dewan memiliki pengakuan yang sama di mata hukum maupun masyarakat”
- “baik laki-laki maupun perempuan memiliki porsi yang sama dalam bekerja tidak ada yang lebih diakui atau tidak”

“sejauh ini kinerja dewan perempuan belum menampakkan elektabilitas dibandingkan laki-laki”

Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju menganggap kinerja dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“hanya rakyat yang berhak memilih tidak terbatas hanya pada adanya kuota 30%”

“tidak ada mengetahui sejauh mana kinerja dewan perempuan yang sejatinya”

“setiap dewan memiliki pengakuan yang sama”

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden berpendapat bahwa siapapun dewan yang terpilih merupakan pilihan rakyat bukan semata-mata karena ada kebijakan terkait kuota dewan perempuan. Sehingga dewan yang menjabat saat ini tentu diakui secara hukum dan diakui masyarakat kota Yogyakarta.

4. Analisis Hukum Kinerja Dewan Perempuan

Hukum dihubungkan dengan kejujuran terkait peraturan, dalam hal ini penelitian ditujukan guna mengetahui sejauh mana kejujuran kerja anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta tahun 2014-2018, penulis sampaikan table sebagaimana berikut :

Tabel 3.4
Pendapat Responden Terkait Kejujuran Kinerja Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

No	Tingkatan Responden	Jumlah Responden	Presentase
1	Sangat Setuju	5	11 %
2	Setuju	6	13 %
3	Biasa Saja	23	49 %
4	Kurang Setuju	11	23 %
5	Tidak Setuju	2	4 %
Jumlah		47	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa presentase terbanyak yaitu 49% di mana responden menganggap bahwa kejujuran anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya pengakuan kinerja sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih jujur dibandingkan laki-laki. Sebanyak 23% responden turut menyatakan tidak setuju, bahkan sebanyak 11% responden menyatakan tidak setuju bahwa dewan perempuan lebih jujur dibandingkan dewan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan setuju sebanyak 13% dan 11% sangat bahwa dewan perempuan lebih jujur dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan wawancara tertulis dengan responden mereka turut memberikan komentar terkait pengisian kuesioner tersebut. Responden yang mengatakan sangat setuju dan setuju mayoritas melihat kinerja dewan dari beberapa hal sebagaimana pendapat beberapa responden berikut:

“perempuan memiliki naluri yang lembut sehingga jarang melakukan kesalahan”

“perempuan saat ini tidak kalah saing dengan laki-laki dalam bekerja terlebih dalam transparansi kepada masyarakat”

“Perempuan lebih berfikir panjang apabila ingin melakukan kesalahan”

“perempuan lebih minim dalam melakukan kebohongan”

Adapun responden yang menyatakan biasa saja menganggap kinerja

dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“tidak selalu didasarkan bahwa perasaan perempuan lebih jujur dibandingkan laki-laki”

“kejujuran dewan saat ini sama saja antara laki-laki maupun perempuan”

“kejujuran kembali pada karakter individunya”

“sama saja sejauh ini belum ada pemberitaan publik yang buruk terkait kinerja dewan”

“tidak dapat dijustifikasi bahwa perempuan lebih jujur dari pada laki-laki”

Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju menganggap kinerja dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“kejujuran tergantung pada kepribadian orang itu sendiri ”

“tidak ada yang mengetahui sejauh mana kejujuran seseorang sebelum keburukannya terlihat ”

“setiap dewan memiliki kejujuran yang sama sejauh ini”

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden berpendapat kejujuran dewan tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan jenis kelamin, kejujuran seseorang berada pada kepribadian orang itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa dewan perempuan lebih jujur dibandingkan laki-laki saat bekerja. Sejauh ini tidak ada tindakan menyimpang terkait kinerja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta di muka publik.

5. Analisis Emosional Kinerja Dewan Perempuan

Emosional berhubungan dengan perasaan sensitif dalam bekerja, dalam hal ini penelitian ditujukan guna mengetahui sejauh mana emosional kerja anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta tahun 2014-2018, penulis sampaikan tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.5
Pendapat Responden Terkait Emosional Kinerja Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

No	Tingkatan Responden	Jumlah Responden	Presentase
1	Sangat Setuju	1	2 %
2	Setuju	17	36 %
3	Biasa Saja	18	38 %
4	Kurang Setuju	11	23 %
5	Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah		47	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa presentase terbanyak yaitu 38% di mana responden menganggap bahwa emosional anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya pengakuan kinerja sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih emosional dibandingkan laki-laki. Sebanyak 36% responden turut menyatakan setuju, dan sebanyak 2% responden menyatakan sangat setuju bahwa dewan perempuan lebih emosional dibandingkan dewan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan kurang setuju sebanyak 23% bahwa dewan perempuan lebih emosional dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan wawancara tertulis dengan responden mereka turut memberikan komentar terkait pengisian kuesioner tersebut. Responden yang mengatakan sangat setuju dan setuju mayoritas melihat kinerja dewan dari beberapa hal sebagaimana pendapat beberapa responden berikut:

“perempuan memiliki naluri yang lembut sehingga lebih emosional pada isu-isu tertentu”

“perempuan memiliki kepekaan terhadap rasa sehingga jauh lebih memikirkan rakyat”

“perempuan lebih lembut dalam hal perasaan sehingga lebih emosional”

“perempuan memiliki naluri yang jauh mementingkan perasaan dibandingkan laki-laki”

“perempuan cenderung akan memikirkan dampak kedepan sebelum memutuskan sesuatu”

Adapun responden yang menyatakan biasa saja menganggap kinerja dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“tidak selalu didasarkan bahwa perasaan perempuan lebih emosional dibandingkan laki-laki”

“apabila emosional prasaan terlalu tinggi akan berpengaruh pada pengambilan keputusan ”

“tidak semua perempuan emosional”

“perempuan juga dapat memposisikan di mana saat emosional dan harus bertanggung jawab dengan tugasnya”

“perempuan juga dapat tegas dalam hal perasaan”

“dewan adalah pembuat kebijakan yang tidak hanya memikirkan perasaan personal”

“perasaan perempuan dapat dikontrol sesuai dengan kondisi dan situasi”

“laki-laki juga memiliki emosional akan tetapi berbeda dengan perempuan”

“hanya pada kondisi dan isu-isu tertentu perempuan cenderung lebih emosional”

Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju menganggap kinerja

dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini :

“perempuan juga dapat tegas mengelola perasaan sebagai anggota dewan”

“tidak semua perempuan memiliki perasaan yang berlebih dalam hal pengambilan keputusan”

“emosional saat bekerja berbeda dengan emosional pribadi”

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan jauh lebih emosional dibandingkan laki-laki hanya saja sejauh ini dewan perempuan lebih emosional hanya pada isu-isu yang sifatnya sensitif terhadap perempuan sehingga perempuan juga dapat memposisikan dirinya di mana harus menata perasaan. Sebagai contoh isu-isu sensitive merupakan isu-isu yang berkaitan dengan social, perempuan, kesetaraan gender, dan Hak Asasi Manusia dimana peran perempuan memiliki banyak pandangan terkait hal tersebut.

6. Analisis Feminisme Kinerja Dewan Perempuan

Feminisme berhubungan dengan naluri wanita/kelembutan dalam bekerja, dalam hal ini penelitian ditujukan guna mengetahui sejauh mana naluri seni wanita didepan umum saat bekerja sebagai anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta tahun 2014-2018, penulis sampaikan tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.6
Pendapat Responden Terkait Feminisme Kinerja Anggota Dewan
Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

No	Tingkatan Responden	Jumlah Responden	Presentase
1	Sangat Setuju	0	0 %
2	Setuju	11	23 %
3	Biasa Saja	27	57 %
4	Kurang Setuju	9	19 %
5	Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah		47	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa presentase terbanyak yaitu 57% di mana responden menganggap bahwa naluri wanita terkait seni anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya naluri seni dalam kinerja sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih memiliki seni yang tinggi dibandingkan laki-laki. Sebanyak 19% responden turut menyatakan kurang setuju bahwa dewan perempuan lebih memiliki naluri seni dibandingkan dewan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan setuju sebanyak 23% bahwa dewan perempuan lebih memiliki seni dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan wawancara tertulis dengan responden mereka turut memberikan komentar terkait pengisian kuesioner tersebut. Responden yang mengatakan sangat setuju dan setuju mayoritas melihat kinerja dewan dari beberapa hal sebagaimana pendapat beberapa responden berikut:

“perempuan memiliki naluri yang lembut sehingga lebih tertata dalam seni berbicara”

“perempuan memiliki naluri untuk berpenampilan anggun di depan umum sehingga terlihat lebih menarik”

“Perempuan memiliki kelembutan hati dan naluri keibuan sehingga lebih mengayomi satu sama lain”

“perempuan cenderung rapi dalam hal tata ruang kerja sehingga lebih teraur dan rapi”

Adapun responden yang menyatakan biasa saja menganggap kinerja

dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“tidak hanya perempuan yang memiliki seni tidak menutup kemungkinan laki-laki juga memiliki jiwa seni”

“dalam ranah politik antara dewan perempuan dengan laki-laki tentu memiliki seni berpolitik yang sama”

“seni sifatnya general tidak dapat dispesifikasikan dalam hal kinerja”

“seni jarang ditampilkan dalam kinerja dewan, karena dewan yang terpenting adalah kinerjanya bagi masyarakat”

Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju menganggap kinerja

dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“yang terpenting adalah argumentasi dewan dalam bekerja menjadi wakil rakyat tidak untuk menunjukkan seni berpolitik di dalamnya”

“seni sangat sulit dinilai akan tetapi tidak ada tolak ukur yang pasti antara dewan perempuan dan laki-laki penilaian seni sifatnya relatif”

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini tingkat seni memang pada dasarnya perempuan terlihat lebih menarik dibandingkan laki-laki hanya saja sejauh ini dewan tidak hanya dilihat dari penampilan akan tetapi seni berbicara dan kemampuan memberikan argumentasi yang berbobot adalah yang terpenting.

7. Analisis Pengawasan Kinerja Dewan Perempuan

Pengawasan berhubungan dengan peraturan dalam bekerja, dalam hal ini penelitian ditujukan guna mengetahui sejauh mana perempuan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan sebagai anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta tahun 2014-2018, penulis sampaikan tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.7
Pendapat Responden Terkait Pengawasan Kinerja Anggota Dewan
Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

No	Tingkatan Responden	Jumlah Responden	Presentase
1	Sangat Setuju	4	9 %
2	Setuju	5	11 %
3	Biasa Saja	27	57 %
4	Kurang Setuju	10	21 %
5	Tidak Setuju	1	2 %
Jumlah		47	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa presentase terbanyak yaitu 57% di mana responden menganggap pengawasan anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya pengawasan yang dilakukan anggota dewan sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih mampu melakukan pengawasan yang baik dibandingkan laki-laki. Sebanyak 21% responden turut menyatakan kurang setuju dan 2% tidak setuju bahwa dewan perempuan lebih mampu melakukan pengawasan dibandingkan dewan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyakatkan setuju sebanyak 11% dan 9% sangat setuju bahwa dewan perempuan lebih mampu melakukan pengawasan dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan wawancara tertulis dengan responden mereka turut memberikan komentar terkait pengisian kuesioner tersebut. Responden yang mengatakan sangat setuju dan setuju mayoritas melihat kinerja dewan dari beberapa hal sebagaimana pendapat beberapa responden berikut:

“perempuan lebih kritis pada isu-isu tertentu”

“perempuan lebih rajin dalam melakukan pengawasan terlebih pada dinas-dinas terkait”

“Perempuan memiliki gaya pengawasan yang lebih terarah dan sopan”
Adapun responden yang menyatakan biasa saja menganggap kinerja

dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“tidak hanya perempuan yang mampu melakukan pengawasan akan tetapi laki-laki juga dapat melakukan pengawasan”

“dewan perempuan dengan laki-laki memiliki kemampuan yang sama dalam pengawasan”

“tidak ada perbedaan antara pengawasan yang dilakukan dewan perempuan dengan laki-laki”

“pengawasan sudah diaur dalam SOP sehingga sama saja mereka melakukan pengawasan”

Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju menganggap

kinerja dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“dengan jumlah dewan perempuan yang tidak seimbang dengan dewan laki-laki tentu dalam pengawasan lebih proaktif laki-laki”

“laki-laki jauh lebih sigap dalam melakukan pengawasan tanpa batasan waktu”

“pengawasan yang dilakukan anggota dewan cenderung sama saja tidak ada pihak yang lebih unggul karena saling melengkapi”

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini pengawasan yang dilakukan antara dewan perempuan dengan dewan laki-laki biasa saja, mayoritas responden berpendapat pengawasan yang dilakukan dewan tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan jenis kelamin, memang pada dasarnya laki-laki jauh lebih menonjol dalam melakukan pengawasan akan tetapi sejauh ini dewan perempuan juga turut melakukan pengawasan di aparat pemerintahan.

8. Analisis Kiritik Kinerja Dewan Perempuan

Kritik berhubungan dengan penyampaian pendapat dalam bekerja, dalam hal ini penelitian ditujukan guna mengetahui sejauh mana perempuan memberikan kritik terhadap kinerja pemerintahan sebagai anggota dewan

perempuan di DPRD kota Yogyakarta tahun 2014-2018, penulis sampaikan tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.8
Pendapat Responden Terkait Pengawasan Kinerja Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

No	Tingkatan Responden	Jumlah Responden	Presentase
1	Sangat Setuju	2	4 %
2	Setuju	12	26 %
3	Biasa Saja	23	49 %
4	Kurang Setuju	8	17 %
5	Tidak Setuju	2	4 %
Jumlah		47	100 %

Sumber : Hasil Penelitian

Tabel di atas menunjukkan bahwa presentase terbanyak yaitu 49% di mana responden menganggap cara mengkritik anggota dewan perempuan di DPRD kota Yogyakarta biasa saja baik itu antara dewan laki-laki maupun dewan perempuan, artinya kritik yang dilakukan anggota dewan sama saja atau tidak ada kecenderungan bahwa dewan perempuan lebih mampu mengkritisi dengan mantap dibandingkan laki-laki. Sebanyak 17% responden turut menyatakan kurang setuju dan 4% tidak setuju bahwa dewan perempuan lebih mampu mengkritisi dibandingkan dewan laki-laki. Walaupun demikian tetap ada responden yang menyatakan setuju sebanyak 26% dan 4% sangat setuju bahwa dewan perempuan lebih mampu mengkritisi dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan wawancara tertulis dengan responden mereka turut memberikan komentar terkait pengisian kuesioner tersebut. Responden yang mengatakan sangat setuju dan setuju mayoritas melihat kinerja dewan dari beberapa hal sebagaimana pendapat beberapa responden berikut:

“wanita juga dapat melakukan kritik dengan tegas didepan umum”
“perempuan terkadang melakukan kritik keras pada isu isu yang sensitif”
“perempuan dapat melakukan kritik dengan mantap berdasarkan fakta dilapangan”

Adapun responden yang menyatakan biasa saja menganggap kinerja

dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“tidak hanya perempuan yang mampu melakukan kritik akan tetapi laki-laki juga dapat melakukan kritik yang tegas”
“antara dewan perempuan dengan laki-laki memiliki kesempatan kritik yang sama”
“laki-laki cenderung tegas dan mantap dalam melakukan kritik didepan umum”
“kritik yang dilakukan dewan perempuan dan laki-laki harus tepat berdasarkan bukti dengan kesempatan yang sama”

Sedangkan responden yang menyatakan kurang setuju menganggap kinerja dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“dengan jumlah dewan perempuan yang tidak seimbang dengan dewan laki-laki tentu dalam melakukan kritik lebih proaktif laki-laki”
“laki-laki jauh lebih tegas dan eras saat melakukan kritik”

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini kritik yang dilakukan antara dewan perempuan dengan dewan laki-laki biasa saja, mayoritas responden berpendapat kritik yang dilakukan dewan tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan jenis kelamin, memang pada dasarnya laki-laki jauh lebih menonjol dalam melakukan kritik akan tetapi sejauh ini dewan perempuan juga turut memberikan kritik di aparat pemerintahan. Yang terpenting adalah dewan mampu memberikan kritik dengan argument yang benar.

B. Pembahasan

Berdasarkan data hasil penilaian narasumber sejauh ini kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sudah berjalan sesuai pada koridornya. Baik itu anggota dewan laki-laki maupun perempuan memiliki kinerja yang sudah maksimal walaupun apabila ditelaah secara mendalam kinerja individual dari setiap dewan tentu memiliki tingkatan yang berbeda. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja anggota dewan antara laki-laki dengan perempuan tentu memiliki perbedaan, akan tetapi kinerja secara umum telah berjalan dengan baik.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan, terlebih dalam menjalankan fungsi legislatifnya. Adapun indikator tersebut meliputi efektivitas, efisiensi, legitimasi, kejujuran, kesabaran, kelembutan, peraturan, dan kritik yang sifatnya lebih general. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2014-2019 memiliki setidaknya 10 anggota dewan perempuan dari total keseluruhan 40 anggota dewan. Satu diantara anggota dewan tersebut menjabat sebagai salah satu posisi pimpinan dewan beliau bernama Ibu Ririk Banowati Permanasari, SH dengan jabatan sebagai wakil ketua DPRD Kota Yogyakarta. Dapat dikatakan bahwa partisipasi politisi perempuan di DPRD kota Yogyakarta sejauh ini terus mengalami peningkatan dengan presentase 20%. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada kinerja anggota dewan dalam memberikan kontribusinya bagi

kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Berikut pembahasan terkait kinerja dewan berdasarkan 8 indikator penilaian :

1. Efektivitas

Selama periode 2014-2018 kinerja anggota dewan perempuan dalam hal kecepatan waktu dapat dikatakan biasa saja, hal tersebut dilihat berdasarkan uraian responden yang telah menilai kinerja dewan. Dapat diartikan bahwa kecepatan kerja anggota dewan perempuan dengan laki-laki sama saja. Tidak ada kecenderungan dalam hal kecepatan kinerja hanya saja secara umum kinerja dewan di DPRD kota Yogyakarta sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan selama periode mereka. Kinerja dewan bersifat perbidang antara komisi satu dengan yang lain sehingga antara komisi memiliki renggang waktu yang berbeda dalam bekerja. Berdasarkan uraian yang diberikan responden dalam wawancara tertulis turut diberikan alasan atas pilihan mereka, berikut alasan responden;

“perempuan relative tidak suka menunda-nunda pekerjaan sehingga terkadang lebih cepat dari pada laki-laki”

“perempuan cenderung akan lebih sigap saat terjadi hal-hal urgent tanpa menunda-nunda waktu”

“Sering adakannya rapat dewan mayoritas anggota dewan perempuan lebih menghargai waktu dengan datang tepat pada waktunya”

“perempuan lebih disiplin terlebih dalam menghargai waktu saat bekerja”

“sebagai salah satu dewan yang harus senantiasa memikirkan rakyat menjadikan waktu pekerjaan adalah hal yang utama bagi perempuan”

“perempuan cenderung lebih rajin dalam bekerja sehingga berpengaruh pada kecepatan waktu kerja”

“walaupun sebagai perempuan elektabilitas kinerja terlebih waktu tidak kalah dengan dewan laki-laki saat bekerja”

“sejauh ini dewan perempuan lebih menghargai waktu baik itu pada hal-hal kecil”

“kecepatan kerja tidak dapat diukur berdasarkan jenis kelamin antara perempuan dengan laki-laki memiliki kemampuan yang sifatnya relatif”

“sejauh ini perlu ditingkatkan lagi terkait komitmen dewan sehingga tugas dewan dapat berjalan tepat waktu”
“normatif yang terpenting adalah dewan dapat menjalankan ugasnya sebagai waktu rakyat”
“baik laki-laki maupun perempuan memiliki porsi yang sama dalam bekerja tidak ada yang cepat maupun lambat”
“sejauh ini kinerja dewan perempuan belum menampakkan elektabilitas dibanding laki-laki”
“dewan perempuan tidak jauh lebih proaktif dibandingkan laki-laki saat bekerja”
“setiap anggota dewan memiliki jam kerja yang sama untuk kinerja yang tentunya berbeda”
“perempuan tidak seperti laki-laki yang sewaktu-waktu dapat hadir apabila dibutuhkan masyarakat karena keterbatasannya”
“Perempuan memiliki keterbatasan dalam hal waktu karena tugas mereka sebagai bagian ibu rumah tangga yang tidak sewaktu-waktu dapat menangani masyarakat pada jam jam tertentu”
“tidak ada mengetahui sejauh mana kinerja dewan yang sejatinya”
“belum ada anggota dewan perempuan yang lebih unggul dari pada laki-laki saat ini dalam bekerja”

Sejauh ini kinerja dewan dalam hal efektifitas pada dasarnya dapat ditingkatkan, tidak hanya bagi dewan perempuan akan tetapi dewan laki-laki. Sebagai salah satu wakil rakyat tentu dewan harus memperhatikan waktu kerja mereka dalam melayani rakyat, sebagaimana saat ini banyak pemberitaan buruk terkait kinerja dewan hal tersebut, sehingga perlu diaktifkan lagi jam kerja dewan agar lebih efektif saat bekerja dimasa jabatannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas sebagaimana dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah bawasannya dalam hal efektifitas jam kerja selama kurang lebih satu periode ini telah menghasilkan 1 Peraturan DPRD, 36 Peraturan Daerah, 4 Persetujuan Bersama, 3 Keputusan DPRD, 1 Keputusan Pimpinan DPRD.

Dapat disimpulkan bahwa anggota dewan Di DPRD Kota Yogyakarta telah memanfaatkan waktu kerja sesuai pada program legislasi yang ada.

2. Efisiensi

Selama periode 2014-2018 kinerja anggota dewan perempuan dalam hal efisiensi biaya program kerja dapat dikatakan biasa saja, hal tersebut dilihat berdasarkan uraian responden yang telah menilai kinerja dewan. Dapat diartikan bahwa biaya program kerja anggota dewan perempuan dengan laki-laki sama saja. Tidak ada kecenderungan dalam hal pembiayaan guna menunjang kinerja mereka.

Pada dasarnya anggaran biaya program kerja sudah ditentukan oleh sekretariat dewan sehingga tidak ada perlakuan khusus antara dewan perempuan dengan laki-laki. Biaya kerja dewan bersifat perbidang antara komisi satu dengan yang lainnya sehingga antara komisi memiliki kebutuhan yang berbeda dalam menjalankan program-programnya terlebih pengajuan biaya yang kerap dilakukan oleh beberapa dinas kerjasama antar komisi tentu mengajukan program kerja dengan anggaran yang berbeda. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pemakaian biaya tidak ada perbelakusan khusus antar dewan perempuan maupun laki-laki, akan tetapi sudah ditentukan oleh sekretariat dewan. Berdasarkan uraian yang diberikan responden dalam wawancara tertulis turut diberikan alasan atas pilihan mereka, berikut alasan responden;

“perempuan relatif bersifat hemat dan teliti dalam menganggarkan program kerja”

“perempuan terlatih untuk manajemen keuangan baik itu dilingkup terkecil yaitu keluarga”

“perempuan cenderung memikirkan anggaran seminimal mungkin untuk kemudian dimaksimalkan”
“perempuan lebih disiplin terlebih dalam menghargai uang saat bekerja”
“sebagai salah satu dewan yang harus senantiasa memikirkan rakyat menjadikan uang adalah milik rakyat untuk rakyat”
“efisiensi anggaran kerja tidak dapat diukur berdasarkan jenis kelamin antara perempuan dengan laki-laki memiliki porsi yang sama”
“sejauh ini perlu ditingkatkan lagi terkait komitmen dewan sehingga tugas dewan dapat berjalan tepat sasaran”
“sebagaimana anggaran program kerja sudah diatur dan ditetapkan pada sekretariat dewan”
“baik dewan laki-laki dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam pemanfaatan anggaran”
“normatif yang terpenting adalah dewan dapat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat”
“sejauh ini anggaran program kerja dewan laki-laki dengan perempuan tidak dibedakan pemanfaatannya”
“baik laki-laki maupun perempuan memiliki porsi yang sama dalam bekerja tidak ada yang lebih banyak maupun lebih sedikit”
“Efisiensi anggaran baik dewan laki-laki dengan perempuan sama saja pada garis dan peraturan yang sudah ditetapkan”
“Dewan tidak bekerja secara perseorangan akan tetapi cenderung pada komisi-komisi di mana setiap komisi memiliki program kerja yang tidak hanya melibatkan perempuan secara perseorangan”

Sejauh ini kinerja dewan dalam hal efisiensi pada dasarnya dapat ditingkatkan, tidak hanya bagi dewan perempuan akan tetapi dewan laki-laki. Sebagai salah satu wakil rakyat tentu dewan harus memperhatikan anggaran kerja mereka dalam melayani rakyat, terlebih fungsi mereka dalam melakukan anggaran harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dilapangan. Karena sejauh ini anggaran yang kerap dianggarkan untuk program kerja Dinas sering kali tidak habis, sehingga bagi mereka anggaran tersebut gagal dilaksanakan, tentu dalam hal tersebut perlu ada pengefesiensian anggaran di mana anggaran tersebut akan lebih bermanfaat untuk program yang lain.

3. Legitimasi

Selama periode 2014-2018 kinerja anggota dewan perempuan dalam hal pengakuan atau legitimasi dapat dikatakan biasa saja, hal tersebut dilihat berdasarkan uraian responden yang telah menilai kinerja dewan. Dapat diartikan pengakuan kinerja anggota dewan perempuan dengan laki-laki sama saja. Tidak ada kecenderungan dalam hal pengakuan kinerja dalam tatanan dewan setiap dewan memiliki elektabilitasnya masing-masing.

Pada dasarnya pengakuan secara hukum sudah ditetapkan bahwa anggota dewan perempuan memiliki setidaknya 30% kuota dari jumlah dewan. Sebagaimana di DPRD kota Yogyakarta saat ini sudah mencapai 20% yang artinya terdapat 10 anggota dewan dari keseluruhan sebanyak 40 dewan. 10 anggotan dewan tersebut sudah diakui, akan tetapi secara general keberadaan perempuan di dewan tetap ditentukan oleh pilihan masyarakat. Tidak harus kuota tersebut terpenuhi ataupun melebihi kuota yang ditentukan tetapi untuk mendorong sekaligus mengapresiasi perempuan yang duduk di kursi dewan. Berdasarkan uraian yang diberikan responden dalam wawancara tertulis turut diberikan alasan atas pilihan mereka, berikut alasan responden;

“perempuan diakui berdasarkan hukum dengan adanya kuota 30%”

“perempuan saat ini tidak kalah saing dengan laki-laki dalam bekerja”

“Perempuan yang sukses didunia perpolitikan sangat banyak di Indonesia”

“perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki”

“perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki”

“pemenuhan kuota 30% bagi dewan perempuan”

“kesetaraan gender di Indonesia entu membuka peluang bagi perempuan untuk berkompetisi diranah politik”

“perempuan turut memberikan pemikiran dari sudut pandang yang lain saat bekerja”

“tidak selalu didasarkan pada pemenuhan kuota 30% akan tetapi rakyat yang memilih dan menentukan”

“perlu ditingkatkan kinerjanya sebagai dewan perempuan”
“bukan hanya sebatas pemenuhan kuota 30%, kuota tersebut adalah apresiasi bagi perempuan yang ingin terjun keranah politik”
“semua dewan memiliki pengakuan yang sama di mata hukum maupun masyarakat”
“baik laki-laki maupun perempuan memiliki porsi yang sama dalam bekerja tidak ada yang lebih diakui atau tidak”
“sejauh ini kinerja dewan perempuan belum menampakkan elektabilitas dibanding laki-laki”
“hanya rakyat yang berhak memilih tidak terbatas hanya pada adanya kuota 30%”
“tidak ada mengetahui sejauh mana kinerja dewan perempuan yang sejatinya”
“setiap dewan memiliki pengakuan yang sama”

Hal yang perlu digaris bawahi bahwa legitimasi anggota dewan pada dasarnya sudah diakui baik itu secara hukum maupun

4. Kejujuran

Selama periode 2014-2018 kinerja anggota dewan perempuan dalam hal kejujuran dapat dikatakan biasa saja, hal tersebut dilihat berdasarkan uraian responden yang telah menilai kinerja dewan. Dapat diartikan bahwa kejujuran individual dewan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta biasa saja. tidak ada tolak ukur yang dapat menentukan seseorang lebih jujur ataupun tidak hanya berdasarkan jenis kelamin. Kejujuran tumbuh dari kepribadian individual masing-masing dewan. Tidak menutup kemungkinan bahwa dewan laki-laki juga dapat jujur dalam bekerja. Terlebih saat ini segala bentuk kecurangan maupun kebohongan publik sudah memiliki konsekuensinya masing-masing. Walaupun demikian kejujuran anggota dewan di DPRD kota Yogyakarta dapat dikatakan baik hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya pemberitaan publik terkait kecurangan yang dilakukan dewan. Berdasarkan

uraian yang diberikan responden dalam wawancara tertulis turut diberikan alasan atas pilihan mereka, berikut alasan responden;

- “perempuan memiliki naluri yang lembut sehingga jarang melakukan kesalahan”
- “perempuan saat ini tidak kalah saing dengan laki-laki dalam bekerja terlebih dalam transparansi kepada masyarakat”
- “Perempuan lebih berfikir panjang apabila ingin melakukan kesalahan”
- “perempuan lebih minim dalam melakukan kebohongan”
- “tidak selalu didasarkan bahwa perasaan perempuan lebih jujur dibandingkan laki-laki”
- “kejujuran dewan saat ini sama saja antara laki-laki maupun perempuan”
- “kejujuran kembali pada karakter individunya”
- “sama saja sejauh ini belum ada pemberitaan publik yang buruk terkait kinerja dewan”
- “tidak dapat dijustifikasi bahwa perempuan lebih jujur dari pada laki-laki”
- “kejujuran tergantung pada kepribadian orang itu sendiri ”
- “tidak ada yang mengetahui sejauh mana kejujuran seseorang sebelum keburukannya terlihat ”
- “setiap dewan memilik kejujuran yang sama sejauh ini”

Terlepas dari pendapat di atas pada dasarnya kejujuran dewan sejauh ini perlu ditingkatkan dengan lebih transparansi kepada pihak umum maupun masyarakat luas dengan memanfaatkan website DPRD kota Yogyakarta. Adanya upaya akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dari kerja dewan sebagai tolok ukur keberhasilan dan transparansi kepada masyarakat.

5. Emosional

Selama periode 2014-2018 kinerja anggota dewan perempuan dalam hal emosional dapat dikatakan biasa saja, hal tersebut dilihat berdasarkan uraian responden yang telah menilai kinerja dewan. Dapat dikatakan bahwa emosional individual dewan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta biasa saja. Walaupun posisinya sebagai seorang perempuan akan tetapi sejauh ini

dewan perempuan tetap dapat mengontrol emosional mereka sebagai sosok perempuan. Memang dalam beberapa kasus anggota dewan perempuan akan cenderung lebih sensitive sebagaimana dalam isu-si terkait kesetaraan *gender*, HAM, perlindungan anak, dan sosial lainnya politisi perempuan cenderung lebih responsif dan peka terhadap isu-isu tersebut. Akan tetapi sejauh ini secara keseluruhan anggota dewan perempuan tidak jauh berbeda dalam menata emosional saat bekerja sebagai dewan. Alur emosional merupakan dinamika dalam bekerja mereka tahu dan paham pada kondisi seperti apa harus mengatur emosional mereka sebagai *public figure*. Berdasarkan uraian yang diberikan responden dalam wawancara tertulis turut diberikan alasan atas pilihan mereka, berikut alasan responden;

“perempuan memiliki naluri yang lembut sehingga lebih emosional pada isu-isu tertentu”

“perempuan memiliki kepekaan terhadap rasa sehingga jauh lebih memikirkan rakyat”

“perempuan lebih lembut dalam hal perasaan sehingga lebih emosional”

“perempuan memilikinaluri yang jauh mementingkan perasaan diandingkan laki-laki”

“perempuan cenderung akan memikirkan dampak kedepan sebelum memutuskan sesuatu”

“tidak selalu didasarkan bahwa perasaan perempuan lebih emosional dibandingkan laki-laki”

“apabila emosional prasaan terlalu tinggi akan berpengaruh pada pengambilan keputusan ”

“tidak semua perempuan emosional”

“perempuan juga dapat memposisikan di mana saat emosional dan harus bertanggung jawab dengan tugasnya”

“perempuan juga dapat tegas dalam hal perasaan”

“dewan adalah pembuat kebijakan yang tidak hanya memikirkan perasaan personal”

“perasaan perempuan dapat dikontrol sesuai dengan kondisi dan situasi”

“laki-laki juga memiliki emosional akan tetapi berbeda dengan perempuan”

“hanya pada kondisi dan isu-isu tertentu perempuan cenderung lebih emosional”

“perempuan juga dapat tegas mengelola perasaan sebagai anggota dewan”

“tidak semua perempuan memiliki perasaan yang berlebih dalam hal pengambilan keputusan”

“emosional saat bekerja berdeda dengan emosional pribadi”

Terlepas dari pendapat di atas pada dasarnya emosional pribadi seseorang tidak dapat diandalkan dalam pembuatan keputusan sehingga dapat dikontrol guna menghasilkan mufakat bersama. Emosional perempuan tidak terlepas dari rasa simpati atau iba dalam menyuarakan hal-hal yang sifatnya lebih sensitif, sehingga tidak selalu bahwa perempuan cenderung lebih emosional dalam bekerja.

6. Feminim

Selama periode 2014-2018 kinerja anggota dewan perempuan dalam hal seni dapat dikatakan biasa saja, hal tersebut dilihat berdasarkan uraian responden yang telah menilai kinerja dewan. Dapat dikatakan bahwa seni baik itu seni berbicara dan sebagainya secara individual dewan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta biasa saja. Perempuan memiliki jiwa seni yang unggul sebagai contoh dalam menata penampilan dewan perempuan dilihat lebih menarik dari pada laki-laki, dengan sifat ramah mereka sebagai perempuan hal tersebut yang kerap membuat nyaman apabila bertemu dengan dewan perempuan. Walaupun demikian tidak hanya sebatas fisik saja seni dapat muncul dari kepribadian orang sebagaimana seni dalam berbicara terlebih dalam menyampaikan argumentasi yang berbobot. Berdasarkan

uraian yang diberikan responden dalam wawancara tertulis turut diberikan alasan atas pilihan mereka, berikut alasan responden;

“perempuan memiliki naluri yang lembut sehingga lebih tertata dalam seni berbicara”

“perempuan memiliki naluri untuk berpenampilan anggun di depan umum sehingga terlihat lebih menarik”

“Perempuan memiliki kelembutan hati dan naluri keibuan sehingga lebih mengayomi satu sama lain”

“perempuan cenderung rapi dalam hal tata ruang kerja sehingga lebih teraur dan rapi”

“tidak hanya perempuan yang memiliki seni tidak menutup kemungkinan laki-laki juga memiliki jiwa seni”

“dalam ranah politik antara dewan perempuan dengan laki-laki tentu memiliki seni berpolitik yang sama”

“seni sifatnya general tidak dapat dispesifikasikan dalam hal kinerja”

“seni jarang ditampilkan dalam kinerja dewan, karena dewan yang terpenting adalah kinerjanya bagi masyarakat”

“yang terpenting adalah argumentasi dewan dalam bekerja menjadi wakil rakyat idak untuk menunjukkan seni berpolitik di dalamnya”

“seni sangat sulit dinilai akan tetapi tidak ada tolak ukur yang pasti antara dewan perempuan dan laki-laki penilaian seni sifatnya relatif”

Terlepas daripendapat di atas bahwa perempuan lebih feminis sehingga anggun dan menarik perhatian tidak semata-mata memberikan kinerja yang bagus, seni dalam bekerja tidak hanya terletak pada penampilan seseorang sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan terkait seni bekerja mereka.

7. Pengawasan

Selama periode 2014-2018 kinerja anggota dewan perempuan dalam melakukan pengawasan pemerintahan dapat dikatakan biasa saja, hal tersebut dilihat berdasarkan uraian responden yang telah menilai kinerja dewan. Dapat dikatakan bahwa kinerja dewan perempuan dalam melakukan pengawasan sejauh ini biasa saja, dewan perempuan melaksanakan

pengawasan hanya pada prosedur yang ada dan sudah teragendakan. Secara personal memang dewan dapat melakukan pengawasan akan tetapi sejauh ini pengawasan yang dilakukan dewan perempuan belum berimbang dengan yang dilakukan dewan laki-laki. Terlebih ruang gerak serta keterbatasan perempuan terkadang pengawasan yang dilakukan hanya pada batasan wajar yang sudah diatur. Akan tetapi sejauh ini dewan perempuan turut berkontribusi dalam melakukan pengawasan baik itu antar dinas kerjasama antar komisi maupun pengawasan diluar itu. Berdasarkan uraian yang diberikan responden dalam wawancara tertulis turut diberikan alasan atas pilihan mereka, berikut alasan responden;

“perempuan lebih kritis pada isu-isu tertentu”

“perempuan lebih rajin dalam melakukan pengawasan terlebih pada dinas-dinas terkait”

“Perempuan memiliki gaya pengawasan yang lebih terarah dan sopan”

Adapun responden yang menyatakan biasa saja menganggap kinerja dewan dari beberapa hal diantaranya pada pendapat responden di bawah ini:

“tidak hanya perempuan yang mampu melakukan pengawasan akan tetapi laki-laki juga dapat melakukan pengawasan”

“dewan perempuan dengan laki-laki memiliki kemampuan yang sama dalam pengawasan”

“tidak ada perbedaan antara pengawasan yang dilakukan dewan perempuan dengan laki-laki”

“pengawasan sudah diaur dalam SOP sehingga sama saja mereka melakukan pengawasan”

“dengan jumlah dewan perempuan yang tidak seimbang dengan dewan laki-laki tentu dalam pengawasan lebih proaktif laki-laki”

“laki-laki jauh lebih sigap dalam melakukan pengawasan tanpa batasan waktu”

“pengawasan yang dilakukan anggota dewan cenderung sama saja tidak ada pihak yang lebih unggul karena saling melengkapi”

Terlepas dari pendapat di atas pengawasan yang dilakukan dewan haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sejauh ini dewan kurang mempertanyanya terkait kinerja dinas dalam beberapa hal yang cenderung dibutuhkan masyarakat.

8. Kritik

Selama periode 2014-2018 kinerja anggota dewan perempuan dalam melakukan kritik terhadap pemerintah dapat dikatakan biasa saja, hal tersebut dilihat berdasarkan uraian responden yang telah menilai kinerja dewan. Dapat dikatakan bahwa kinerja dewan perempuan dalam memberikan kritik sejauh ini biasa saja, dewan perempuan tentu turut memberikan kritik ataupun masukan baik itu dalam kinerjanya sebagai dewan maupun kepada lembaga pemerintahan yang lain. Apabila dibandingkan dengan laki-laki sejauh ini kritik lebih mantap diberikan oleh dewan laki-laki dengan ketegasan mereka. Akan tetapi, tidak menurut kemungkinan bahwa dewan perempuan juga mampu memberikan kritik, hanya saja kritik yang mantap diberikan dewan perempuan terbatas hanya pada isu-isu tertentu saja, seperti halnya isu-isu yang sensitif terkait perempuan tentu mereka jauh lebih memahami sehingga mampu memberikan kritik yang maksimal. Berdasarkan uraian yang diberikan responden dalam wawancara tertulis turut diberikan alasan atas pilihan mereka, berikut alasan responden;

“wanita juga dapat melakukan kritik dengan tegas didepan umum”

“perempuan terkadang melakukan kritik keras pada isu isu yang sensitif”

“perempuan dapat melakukan kritik dengan mantap berdasarkan fakta dilapangan”

“tidak hanya perempuan yang mampu melakukan kritik akan tetapi laki-laki juga dapat melakukan kritik yang tegas”

“antara dewan perempuan dengan laki-laki memiliki kesempatan kritik yang sama”

“laki-laki cenderung tegas dan mantap dalam melakukan kritik didepan umum”

“kritik yang dilakukan dewan perempuan dan laki-laki harus tepat berdasarkan bukti dengan kesempatan yang sama”

“dengan jumlah dewan perempuan yang tidak seimbang dengan dewan laki-laki tentu dalam melakukan kritik lebih proaktif laki-laki”

“laki-laki jauh lebih tegas dan eras saat melakukan kritik”

Terlepas dari pendapat di atas kritik yang dilakukan dewan haruslah masuk akal sebagai sebuah argument yang di dasari dengan bukti dan fakta yang tepat, sejauh ini tentu dewan harus melakukan pengawasan sekaligus kritik terlebih pada dinas-dinas yang ada di Kota Yogyakarta sebagai salah satu upaya penegakan perda yang dibuat.

C. Observasi

Selain melakukan penelitian dengan pengisian kuesioner terhadap 47 responden, peneliti turut melakukan observasi lapangan, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.9
Tabel Observasi

No	Hari, Tanggal	Uraian Kegiatan	Keterangan
1	Rabu, 27 Desember 2018	Bertemu dengan Dinas Sosial Kota Yogyakarta, guna melakukan pengisian kuesioner dan wawancara tertulis dengan kepala dinas, kepala bagian di mana beliau bersedia mengisi	Fraksi partai apapun di DPRD Kota Yogyakarta terlebih perempuan harus mempertanyakan kinerja Dinas Sosial dalam mengurus anak terlantar di Kota Yogyakarta

		kuesioner dan wawancara tertulis	
2	Kamis, 28 Desember 2018	Bertemu dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta untuk bertemu kepala dinas dan kepala bagian hanya saja kepala dinas menolak mengisi kuesioner	Kemungkinan hal tersebut disebabkan mendekati Pemilu 2019 sehingga cenderung tertutup untuk memberikan komentar terkait kinerja dewan
3	Jum'at, 29 Desember 2018	Bertemu dengan SATPOL-PP Kota Yogyakarta untuk bertemu dengan Kepala SATPOL-PP dan kepala bidang, akan tetapi hanya beberapa yang dapat ditemui untuk melakukan pengisian kuesioner dan wawancara tertulis	Anggota DPRD Kota Yogyakarta khususnya perempuan seharusnya mempertanyakan apakah mereka sudah membersihkan lokalisasi sarkem sejauh ini
4	Kamis, 3 Januari 2019	Bertemu dengan Fraksi PAN, seluruh anggota Partai PAN bersedia untuk mengisi kuesioner dan wawancara tertulis, setidaknya terjadi percakapan yang akif antara peneliti dengan responden	Terlihat bahwa anggota Partai PAN khususnya perempuan lebih aktif dibandingkan laki-laki, mereka terlihat lebih ramah dan lembut dalam memberikan pelayanan, melihat bahwa ada calon yang ingin pindah ke legislatif nasional
5	Jum'at, 4 Januari 2019	Bertemu dengan Fraksi PDIP, seluruh anggota partai terlihat ramah dan interaktif dengan kedatangan peneliti dan memberi kesempatan dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan pengisian kuesioner serta	Bayangan orang bahwa partai PDIP lebih premanisme ternyata salah, bahkan mempermudah penelitian tanpa harus dilingkup kantor DPRD Kota, melihat juga kursi fraksi PDIP terbanyak di dewan

		wawancara tertulis	
6	Senin, 7 Januari 2019	Bertemu dengan Fraksi Gerindra, seluruh anggota partai bersedia untuk mengisi pengisian kuesioner akan tetapi tidak bersedia untuk melakukan wawancara tertulis karena kesibukan	Gerinda memiliki lima kursi di dewan yang diisi oleh perempuan semua, kemungkinan akan mempengaruhi dengan perolehan kursi berikutnya bagi perempuan
7	Selasa, 8 Januari 2019	Bertemu dengan Fraksi PKS, beberapa dewan sulit untuk bertemu hanya beberapa yang mau melakukan pengisian kuesioner serta percakapan	Beberapa dewan memilikikesibukan bahkan giat kampanye yang kemungkinan akan berpengaruh pada perolehan suara berikutnya

Sumber : Hasil Observasi

Berdasarkan tabel di atas selama peneliti melakukan observasi kerja di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebanyak 3 hari. Dari hasil observasi ditemukan beberapa hal dan kendala, adapun hal-hal tersebut adalah dari 40 anggota dewan tidak semua dewan pada waktu itu berada di kantor DPRD Kota Yogyakarta. Ada beberapa dewan yang melakukan dinas ke luar kota ataupun acara tertentu.

Observasi yang dilakukan penulis juga menunjukkan bahwa tidak semua dewan memiliki waktu luang atau bersedia untuk mengisi kuesioner, terlebih dari pada itu alur birokrasi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Yogyakarta terkesan lambat dan tertutup. Salah satu fraksi yang cepat dan reaktif dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah fraksi PDIP dan PAN kedua fraksi tersebut sangat terbuka bahkan mengajak melihat kinerja dewan berdasarkan fraksi mereka tanpa alur birokrasi.

